

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM
BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BONE**

A Zakinah Putri Adiningsih

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Muh. Nur Yamin

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Jl. A.P. Pettarani Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar
Email : nuryamin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Kabupaten Bone. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Wawancara dan Dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan di Kab.Bone dapat dikatakan belum berjalan dengan baik sesuai dengan teori Meriee S.Grindle, Hal ini dapat dilihat dari 2 Indikator yang didalamnya mencakup 9 Sub Indikator Implementasi kebijakan yaitu Pertama Isi Kebijakan mencakup : a. kepentingan b. Manfaat. c. Perubahan, d. Pengambilan keputusan, e. pelaksana program dan f. sumber daya. Kedua, lingkungan kebijakan mencakup a. strategi, b. karakteristik lembaga, c. kepatuhan dan respon pelaksana.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemenuhan hak ABK, Pendidikan inklusif

1. Latar Belakang

Implementasi merupakan suatu proses dari kebijakan publik. Sebelum mengimplementasi kebijakan, terlebih dahulu dilakukan perumusan sebuah kebijakan dengan tujuan yang jelas. Implementasi juga salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menyampaikan sebuah kebijakan untuk masyarakat dengan tujuan dari kebijakan tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut ada beberapa persiapan terhadap peraturan - peraturan yang merupakan interpretasi terhadap kebijakan tersebut. Misalnya dalam sebuah undang - undang muncul beberapa peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan Peraturan Daerah untuk menyiapkan sumber daya guna mengimplementasikan sebuah kebijakan yang telah dibuat.

Pemerintah merupakan instrument yang paling penting untuk mewujudkan tujuan bernegara diantaranya mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa dimana tujuan tersebut dapat terwujud apabila pondasi bernegara dapat dijaga dan dijalankan dengan baik, sesuai yang diatur pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Pemerintah yang mengatur jalannya proses berkehidupan dalam mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa dan bernegara sesuai dengan amanat konstitusi yang ada tanpa membedakan hak warga negara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu hak warga negara merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan. Hak-hak warga negara telah diatur dengan

jelas melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pemerintah tidak hanya mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak para warga Negara yang non disabilitas tetapi pemerintah juga harus memperhatikan dan memenuhi hak - hak para penyandang disabilitas, sehingga adil diperlakukan seluruh Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun (2016) Tentang Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam waktu lama yang dapat menghalangi berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan Masyarakat.

Penyandang disabilitas juga mempunyai hak, kedudukan maupun kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas yang merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI). Penyandang disabilitas sudah sepatutnya mendapatkan perlakuan khusus, sebagai upaya bentuk perlindungan dari kerentanan dalam berbagai tindakan diskriminasi terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Yang dimana perlakuan khusus dipandang sebagai upaya memaksimalkan dari penghormatan, perlindungan, maupun pemenuhan hak asasi manusia.

Berbagai macam bentuk kelompok Penyandang Disabilitas di masyarakat antara lain penyandang disabilitas yang menderita cacat fisik, mental, atau gabungan (cacat fisik dan cacat mental). Dengan kondisi penyandang disabilitas

tersebut sebagian besar hanya berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di lingkungan masyarakat atau berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas karena hambatan dalam mengakses layanan umum seperti mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Pendidikan merupakan hak bagi semua warga negara yang artinya pendidikan dapat dilaksanakan tidak memandang perbedaan baik dari sudut pandang agama, rasa, suku, fisik maupun bangsa. Pendidikan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu bangsa. Untuk menuju bangsa yang beradab dan bermartabat, tujuan bernegara tersebut dibuat peraturan perundang - undangan untuk menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan bagi setiap warga negara bagi penyandang disabilitas.

Undang - Undang Dasar, (1945) Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, berdasarkan ayat tersebut bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Terkait untuk memperoleh pendidikan, tertuang dalam Undang - Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003) Pasal 5 Ayat 1 bahwa Negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa warga negara yang

memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Undang – undang tersebut menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh kesempatan yang sama dengan anak – anak normal dalam mendapatkan pendidikan.

Implementasi mengenai pendidikan khusus telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun (2009) tentang pemberian kesempatan atau peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas). Sekolah tersebut yang sering disebut sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

Di Indonesia dalam hal pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus masih belum maksimal, dikarenakan masih memisahkan antara anak berkebutuhan khusus dari anak – anak normal dan menempatkan mereka disekolah khusus atau sering di sebut Sekolah Luar Biasa (SLB). Pendidikan di SLB tidak menjamin kesempatan anak berkebutuhan khusus bisa mengembangkan potensi secara optimal serta dapat menghambat proses komunikasi dan interaksi antara anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal lainnya.

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan salah satu lembaga khusus yang dapat menampung anak-anak yang mempunyai jenis kelainan yang sama, sehingga terdapat Sekolah Luar Biasa, Sedangkan sekolah penyelenggara pendidikan

inklusif yaitu sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus yang mempunyai guru, kegiatan belajar mengajar, kurikulum, serta sarana pengajaran yang sama. Tetapi selama ini diketahui bahwa masih banyak sekolah reguler yang tidak bersedia untuk menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan terdapat Jumlah penduduk Kabupaten Bone berjumlah 809.441 jiwa, terdiri dari 396.081 laki-laki dan 413.360 perempuan. serta Jumlah Penyandang disabilitas pada tahun 2015 berjumlah mencapai 6.383 orang yang terdiri dari 3.305 berjenis kelamin laki-laki dan 3.078 berjenis kelamin perempuan yang tersebar diberbagai wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Pada tahun 2019 Jumlah Penyandang Disabilitas Menurun dari tahun sebelumnya berjumlah sebesar 4.512 Jiwa.

Di Kabupaten Bone terdapat Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan. Dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bone membuat sebuah program baru yaitu program pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pemerintah Daerah dalam hal ini

Dinas Pendidikan Kabupaten Bone telah menunjuk berbeberapa sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi yang dikuatkan dengan adanya Surat keputusan Bupati Kabupaten Bone mengenai beberapa sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Andi Takdir selaku ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) mengatakan bahwa : masih rendahnya pendidikan bagi penyandang disabilitas di kabupaten Bone disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan bagi penyandang disabilitas. Fakta dilapangan hanya ada 5 orang yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi sisanya tidak bisa melanjutkan pendidikan karena keterbatasan aturan daerah yakni fisik dan jasmani (Ilham, 2016) Rakyatku.com.

Adapun permasalahan yang muncul di kabupaten bone : 1. Masih Kurangnya SLB di Kabupaten Bone maka Hal ini berakibat pada banyaknya anak-anak berkebutuhan yang belum mendapatkan pendidikan. 2. Belum tersedia Tenaga Pengajar Khusus bagi Anak - anak berkebutuhan khusus. 3. Belum tersedianya fasilitas untuk ABK di sekolah reguler yang ditunjuk sebagai penyelenggara program pendidikan inklusif. Dari Permasalahan tersebut dapat berakibat pada timbulnya kegagalan hak untuk mendapatkan Pendidikan pada penyandang disabilitas.

Penelitian Pertama dilakukan oleh Paikah (2017) dengan judul implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di kabupaten Bone hasil penelitian tersebut bahwa Implementasi Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di kabupaten bone tidak sepenuhnya berjalan dengan maksimal dikarenakan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 belum dibentuk dalam ketentuan khusus yang dituangkan didalam Perda Kabupaten Bone.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Andriyani (2017) dengan judul implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar taman muda ibu pawiyatan Yogyakarta hasil penelitian tersebut yaitu proses penerapan di SD taman muda ibu pawiyatan di bagi menjadi tiga aspek yaitu tenaga pendidik kependudukan, kurikulum dan sarana prasarana. Tenaga pendidik kependidikan di SD taman muda ibu pawiyatan hanya mempunyai lima belas *shadow* pribadi, dua orang GPK, satu GPK sekolah dan satunya lagi merupakan guru kunjung yang hanya datang dua kali seminggu, sekolah tersebut menggunakan kurikulum yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus dan anak reguler disamakan menggunakan kurikulum 2013. Sarana dan prasarana disekolah tersebut masih minim karena tidak memiliki pegangan ditembok untuk memudahkan mobilitas ABK, jalan blok untuk tunanetra, tidak adanya ruang khusus untuk pengelola inklusi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas ada permasalahan yang diamati oleh penulis, masalah

terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan kabupaten bone sehubungan dengan masalah tersebut maka penulis akan tertarik melakukan penelitian terlebih dahulu dengan judul “**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bone**”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan maka masalah yang akan dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang pendidikan di Kabupaten Bone?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, Maka Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Kabupaten Bone.

4. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian kebijakan publik

Chandler dan Plano dalam Kadji, (2015: 8) mengemukakan bahwa: “Kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah”. Kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan itu telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik, dan kebijakan publik itu

merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam semua bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam konteks organisasi, baik yang berukuran kecil maupun berukuran besar, seperti suatu bangsa, kebijakan publik merupakan instrument yang nyata menggambarkan hubungan yang riil antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini karena dengan melalui kebijakan publik segala proses penyelenggaraan negara, pembangunan dan pelayanan public akan mulai berjalan. Maka kebijakan publik sebagai titik awal (starting point) pengoperasian program – program atau kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta. Oleh karena itu, Pareto pernah berkata bahwa kebijakan publik merupakan faktor kritikal bagi kemajuan dan kemunduran suatu negara-bangsa.

Tangkilisan (2003) dalam Taufiqurokhman, (2014 : 4) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah ditengah masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Carl I. Eriedrick dalam Dwijowijoto (2003:4) mendefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan adanya ancaman dan peluang maka

kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah aturan yang telah ditetapkan dalam rangka untuk mengikuti aturan tersebut baik yang membuat aturan kebijakan maupun masyarakat.

Kebijakan publik merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait yang dilakukan oleh pemerintah dengan stakeholder dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik.

Menurut Mulyadi (2018:3) Dari ketiga proses tersebut, tahapan implementasi dan evaluasi kebijakan publik merupakan hal yang penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk setiap kebijakan publik yang dihasilkan harus betul – betul bisa diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan dilakukan evaluasi melalui upaya untuk menilai secara kritis dan cerdas terhadap kebijakan publik yang akan dan sedang dilakukan, sejauh mana kebijakan publik mencapai tujuan, sasaran dan dampak yang diharapkan dari kebijakan publik tersebut.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah pelaksanaan dari sesuatu yang telah direncanakan, dirancang, diformulasikan, ditetapkan dan disahkan. Pada dasarnya

implementasi merupakan tolak ukur dari suatu kebijakan berhasil atau tidaknya, dimana proses implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat menentukan sekaligus menegangkan. Proses ini menjadi penting disebabkan akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil selalu pada tahap implementasi. Seandainya rumusan kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut, merupakan usaha yang sia – sia tidak ada artinya.

Sebagai tolak ukur keberhasilan kebijakan publik adalah dapat dilihat pada bagaimana implementasinya. Rumusan kebijakan yang dibuat bukan hanya sekedar berhenti pada tataran rumusan, melainkan harus secara fungsional dilaksanakan. Sebaik apapun rumusan kebijakan yang dibuat, jika tidak diimplementasikan, tidak akan dapat dirasakan manfaatnya. Sebaliknya, sesederhana apa pun rumusan kebijakan, jika sudah diimplementasikan, akan lebih bermanfaat, apa pun hasilnya. (Cudai, 2020).

Menurut Grindle (1980) dalam Mulyadi, (2018:24) bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana sudah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Selanjutnya pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan sebuah kebijakan yang dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasi dalam bentuk program atau melalui kebijakan

turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Gordon dalam Mulyadi, (2018: 24-25) Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasi dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit – unit dan metode – metode untuk melaksanakan sumber daya, unit – unit dan metode – metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah – istilah program ke dalam rencana – rencana dan petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrumen – instrument mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran – pembayaran. Implementasi merupakan tahap realisasi tujuan – tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang – peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahkan tugas melaksanakan program.

Menurut Agustino, (2017: 133-140) Berikut ini ada beberapa macam model-model Implementasi Kebijakan yaitu:

1) Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III (1980)

Model implementasi kebijakan ini memakai pendekatan *top down*, dalam menganalisis implementasi kebijakan, model

implementasi kebijakan George C. Edward III berfokus pada empat variable yang dianggap meyakinkan sebuah proses implementasi kebijakan, adalah sebagai berikut:

- 1) Komunikasi
(*Communication*)
- 2) Sumber daya (*Resources*)
- 3) Disposisi (*Disposition*)
- 4) Struktur birokrasi
(*Bureaucratic Structure*)

2) Model *Advokasi Coalition Framework* (ACF) dari Sabatier

Advokasi Coalition Framework (ACF) dari Sabatier dan kolega merupakan teori implementasi generasi ketiga yang paling mutakhir. ACF menggeser perhatian dari sekedar studi implementasi ke arah studi perubahan kebijakan. ACF menyediakan suatu pendekatan terhadap seluruh proses kebijakan, dan untuk memahami perubahan kebijakan dalam periode waktu yang panjang (Aslinda & Guntur, 2017). Sabatier mendesain ACF untuk menjelaskan perilaku politik dari aktor-aktor dalam proses kebijakan.

Pengembangan teori ini merupakan respon terhadap tiga keterbatasan dalam literatur proses kebijakan, yakni :

- 1) Teori-teori kausal yang ada tentang proses kebijakan yang tidak memadai;
- 2) Debat kepanjangan tentang kekuatan dan kelemahan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* serta kebutuhan akan suatu teori kebijakan yang berbasis sistem;
- 3) Kurangnya teori dan penelitian tentang peran ilmu pengetahuan

dan informasi teknis dalam proses kebijakan.

ACF mempunyai tiga komponen struktural pokok yang saling berinteraksi. Ketiga komponen yang dimaksud adalah parameter sistem yang relatif stabil, peristiwa eksternal, dan subsistem kebijakan. ACF berasumsi bahwa sebagian besar dari proses kebijakan berlangsung dalam subsistem kebijakan. Setiap kebijakan pada suatu sektor tertentu adalah subsistem kebijakan karena sektor-sektor tersebut secara bersama-sama membentuk sistem kebijakan nasional.

Parameter sistem yang relatif stabil dan peristiwa eksternal merupakan dua sistem eksternal yang meletakkan peluang bagi dan kendala terhadap koalisi-koalisi subsistem dan subsistem kebijakan. Kendala eksternal merupakan bagian yang paling nyata dari aktivitas kebijakan. Proses implementasi kebijakan dalam suatu subsistem kebijakan dibatasi oleh sejumlah fitur sosial, hukum dan sumber daya dari masyarakat dimana subsistem kebijakan tersebut berada (Aslinda, 2014).

3) Model Merilee S. Grindle (1980)

Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ditentukan dengan isi dan konteks implementasinya. Dari kedua perihai tersebut harus didukung oleh proyek individu dan program aksi yang didesain dan dibiayai atas tujuan kebijakan, sehingga dalam penyelenggaraan kegiatan akan mendapat hasil berupa dampak kepada masyarakat individu dan kelompok beserta perubahan dan

penerimaan bagi masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan. Indikator isi kebijakan menurut Grindle yaitu:

- a. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan
- b. Tipe manfaat yang dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai.
- d. Letak pengambilan keputusan.
- e. Pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dilibatkan.

Adapun lingkungan Kebijakan indikator-indikatornya yaitu:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatutan dan daya tangkap dari pelaksana

3. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah menunjuk pada otoritas administratif disuatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara, yang dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terdiri atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi kemudian terbagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota memiliki pemerintahan Daerah yang diatur oleh Undang-Undang.

Dalam Tahir (2014 : 119) Pemerintahan Daerah merupakan pelaksana perkara pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan dasar otonomi seluas-luasnya pada sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia seperti dimaksudkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka setiap Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang terpilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing selaku Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Kepala Daerah Dibantu Oleh satu orang wakil kepala daerah untuk Provinsi yang dikenal sebagai wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut wakil Bupati sedangkan untuk Kota disebut Wakil Wali Kota, yang dimana Kepala dan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas, wewenang, kebijakan maupun larangan.

4. Pengertian Penyandang Disabilitas

Dalam Ashar et al., (2019: 15) Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat pengertian penyandang disabilitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut: “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya dan terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental”.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang menderita disabilitas fisik, disabilitas mental ataupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementrian sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementrian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah Penderita Cacat.

Penyandang disabilitas sama dengan manusia biasanya yang memerlukan kondisi lingkungan yang sehat dan tidak berada dalam lingkungan yang ketakutan akibat diskriminasi yang berkepanjangan. Padahal, manusia selayaknya manusia berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Juga bagi penyandang disabilitas yang harus diperlakukan sama dengan yang lainnya.

5. Pengertian Pendidikan inklusif

Menurut Sukinah, (2010 : 41) berpendapat bahwa pendidikan inklusi yaitu implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian dan keberfungsian fisik serta psikologis. Untuk pendidikan di sekolah inklusif pembelajaran ditekankan pada penanaman sikap simpati respect, apresiasi, dan empati terhadap latar belakang social budaya yang berbeda. Dan sekolah inklusi adalah tempat dimana komunitasnya belajar tentang bagaimana sikap toleransi terhadap keberagaman diposisikan serta dihargai.

Menurut Hamidi, (2016 : 660) Pendidikan inklusif merupakan sebuah strategi yang bertujuan untuk mengurangi, bahkan menghilangkan batasan atau hambatan dalam mengakses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Selama ini seringkali anak berkebutuhan khusus mengalami penolakan ketika mendaftar di sekolah umum, dan diminta untuk bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Dengan berbagai alasan yang seringkali disampaikan pihak sekolah.

Pendidikan inklusi merupakan sekolah harus mengakomodasi semua anak-anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Pendidikan inklusi yaitu sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus disekolah Reguler (SD, SMP, SMU Atau SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya.

5. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih karena peneliti akan mengungkapkan data berdasarkan pengamatan, dan menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan.

Menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggali fakta mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas dalam bidang Pendidikan di Kabupaten Bone.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang pendidikan di Kab. Bone, dimana diketahui bahwa dimunculkan program pendidikan inklusif sebagai upaya mempermudah penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya untuk berpendidikan di sekolah – sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif.

Penelitian ini menghubungkan temuan hasil penelitian dengan indikator yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah teori Merilee S.Grindle dalam Agustino: pertama, isi kebijakan mencakup 6 sub indikator sebagai berikut a, kepentingan, b. manfaat, c. perubahan, d. pengambilan keputusan, e. Pelaksana Program, f. Sumber Daya, kedua, lingkungan kebijakan mencakup 3 sub indikator sebagai berikut: a. strategi aktor, b. karakteristik, c. Kepatuhan dan respon pelaksana, Setelah melakukan penelitian dilapangan dapat dilihat hasil Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2017 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di kabupaten bone.

Berdasarkan hasil rekapitulasi ke Sembilan Sub Indikator implementasi kebijakan maka dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Perda Nomor 5 tahun

2017 dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dibidang pendidikan. Dalam hal ini diadakan program pendidikan inklusif di kabupaten bone ada empat sub indikator yang dikatakan kurang baik seperti pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya, kekuasaan,. dan karakteristik lembaga. Sementara ada lima sub indikator yang dikatakan baik yaitu kepentingan, manfaat, perubahan, strategi serta kepatuhan dan daya tanggap. Untuk lebih jelasnya di uraikan sebagai berikut :

1. Isi kebijakan mencakup 6 sub indikator sebagai berikut :

a. Kepentingan

Hasil yang diperoleh dapat dinilai baik disebabkan dengan adanya pelaksanaan program pendidikan inklusif maka terpenuhinya juga hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan.

b. Manfaat

Hasil yang diperoleh dinilai baik karena pelaksanaan program pendidikan inklusif untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan tentu ada manfaat yang dihasilkan yaitu dapat menyadarkan masyarakat yang belum paham tentang inklusif serta memberi pemahaman bagi orang tua bahwa program pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan kesempatan penyandang disabilitas untuk masuk disekolah reguler belajar bersama dan bermain dengan siswa non disabilitas lainnya.

c. Derajat Perubahan yang diinginkan

Hasil yang diperoleh sudah baik karena ada perubahan yang

dirasakan oleh masyarakat Kab.Bone dengan adanya pelaksanaan program pendidikan inklusif seperti ABK sudah bisa mendapatkan pendidikan di sekolah reguler tanpa harus mencari SLB serta masyarakat sudah mempercayakan sekolah pelaksana program pendidikan inklusif untuk mendidik Anak Berkebutuhan khusus.

d. Pengambilan keputusan

Hasil yang diperoleh dapat dinilai kurang baik disebabkan bahwa yang menentukan sebuah keputusan dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif yakni sekretaris, akan tetapi sekretaris masih dinilai kurang baik dalam pengambilan keputusan karena dalam pelaksanaan dilapangan masih banyaknya kendala – kendala yang belum diatasi.

e. Pelaksana program

Hasil yang diperoleh dapat dinilai masih kurang baik disebabkan pelaksana program masih lalai dalam menjalankan tugasnya dan belum bisa mengatasi kendala – kendala yang terjadi dilapangan seperti halnya belum ada pengadaan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif. Dengan meelihat masalah seperti itu sebagai pelaksana tentu lebih jeli dalam mengatasi hal tersebut sehingga mencari bagaimana cara agar dipradakan guru pembimbing khusus untuk ABK dimasing – masing sekolah demi kelancaran proses pembelajaran disekolah tersebut.

f. Sumber daya dilibatkan

Hasil yang diperoleh dinilai masih kurang baik disebabkan Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program pendidikan

inklusif dapat dikatakan masih kurangnya keikutsertaan SDM di dinas pendidikan dalam menjalankan suatu program serta belum tersedianya anggaran dari APBD sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan program tersebut.

2. Lingkungan kebijakan mencakup 3 sub indikator yaitu :

a. Strategi

Hasil yang diperoleh dinilai sudah baik karena dinas pendidikan dan sekolah – sekolah inklusif sudah melakukan berbagai macam cara untuk mensosialisasikan ke masyarakat tentang pelaksanaan program pendidikan inklusif, adapun cara yang dilakukan seperti sosialisasi ke Camat, kepala desa serta masyarakat untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan antara anak disabilitas (ABK) dan non disabilitas untuk mendapatkan pelayanan pendidikan karena mereka semua mempunyai hak yang sama, serta mengadakan festival inklusif yang dimana tujuannya untuk menyampaikan informasi terkait program inklusif, dan melalui berita bergambar (Koran).

b. Karakteristiik lembaga

Hasil yang diperoleh kurang baik disebabkan bahwa pada dasarnya di dinas pendidikan sudah menyiapkan bidang khusus untuk mewadahi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan akan tetapi dinas pendidikan masih dinilai kurang baik dalam pengadaan fasilitas karena dinas pendidikan dan sekolah inklusif belum menyediakan ruangan khusus untuk berkonsultasi sehingga dapat menghambat masyarakat dalam mendapatkan

informasi – informasi tentang program pendidikan inklusif.

c. Kepatuhan dan repon pelaksana

Hasil yang diperoleh sudah baik disebabkan dinas pendidikan sudah baik dalam menjalankan tugas untuk mewadahi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan di sekolah reguler yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif kabupaten Bone, adapun respon dari dinas pendidikan bahwa mereka tetap konsisten dalam menjalankan tugasna agar program pendidikan inklusif dapat terus berjalan secara baik dengan memperbaiki segala kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

6. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan di Kabupaten Bone sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepentingan, dinilai baik karena dengan adanya pelaksanaan program pendidikan inklusif terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan
2. Manfaat, dinilai baik karena dengan adanya pelaksanaan program pendidikan inklusif maka manfaat yang dihasilkan yaitu dapat menyadarkan masyarakat yang belum paham tentang inklusif
3. Perubahan, dinilai baik karena perubahan yang dirasakan oleh masyarakat kab.bone dengan

adanya program pendidikan inklusif yaitu ABK sudah bisa mendapatkan pendidikan di sekolah reguler tanpa harus mencari SLB dan masyarakat sudah mempercayakan sekolah tersebut untuk mendidkan Anak Berkebutuhan Khusus.

4. Pengambilan Keputusan, dinilai masih kurang baik karena dalam pengambilan sebuah keputusan yaitu sekertaris, tetapi dalam pengambilan keputusan masih dinilai kurang baik disebabkan belum mampu untuk mengatasi kendala – kendala yang terjadi dilapangan.
5. Pelaksana program, dinilai masih kurang baik karena pelaksana program masih lalai dalam mengatasi kendala – kendala yang terjadi dilapangan seperti halnya pengadaan guru pembimbing khusus yang belum tersedia di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
6. Sumber Daya, dinilai masih kurang baik disebabkan masih kurangnya keikutsertaan SDM di dinas pendidikan dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif serta belum tersedianya anggaran dari APBD
7. Strategi, dinilai baik karena dinas pendidikan dan sekolah inklusif sudah melakukan berbagai macam cara untuk mensosialisasikan program seperti sosialisasi ke camat, kepala desa, serta masyarakat untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan antara anak disabilitas (ABK) dan non disabilitas untuk mendapatkan

pelayanan pendidikan karena mereka semua mempunyai hak yang sama, pengadaan festival inklusif, dan melalui berita bergambar (Koran).

8. Karakteristik, dinilai kurang baik karena belum ada pengadaan fasilitas di dinas pendidikan dan sekolah inklusif seperti belum tersedia ruangan khusus untuk masyarakat yang ingin berkonsultasi.
9. Kepatuhan dan Respon, dinilai baik karena dinas pendidikan sudah menjalankan tugasnya untuk mewadahi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan, serta respon dari dinas pendidikan yaitu masih tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya agar program pendidikan inklusif dapat terus berjalan secara baik dengan memperbaiki segala kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini terkait implementasi perda no 5 tahun 2017 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya program pendidikan inklusif dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di kabupaten Bone, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Anak Berkebutuhan khusus yang ada di Kab.Bone dalam pelaksanaan program masih kurang baik karena masih banyak kendala – kendala yang dihadapi dalam pengimplemntasiannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan pemerintah daerah dan dinas pendidikan dapat memperbaiki agar selanjutnya bisa

berjalan dengan baik dari sebelumnya

C. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat direkomendasikan yang diharapkan kepada pemerintah daerah yakni :

1. memberikan dana APBD dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif agar bisa berjalan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat dan bisa berjalan dengan baik seperti sebelumnya.
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kab.Bone dapat memperbaiki pengimplementasiannya Program Pendidikan Inklusif disebabkan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang pendidikan.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). Dasar - dasar Kebijakan Publik.
- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. 23(1).
- Andriyani, W. (2017). Skripsi Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Taman Muda Ibu Pawiyatan Yogyakarta.
- Ashar, D., Ashila, B. I., & Pramesa, G. N. (2019). Buku Disabilitas berhadapan dengan hukum dalam lingkup pengadilan (cetakan pe). Diterbitkan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) bekerjasama dengan Australia Indonesia

- Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).
- Aslinda. (2014). Model Koalisi Advokasi dalam Perubahan Kebijakan Tata Ruang di Kota Makassar.
- Cudai, A. (2020). Kemitraan, Digitalisasi & Inovasi Kebijakan Publik Di Era Globalisasi. Universitas Negeri Makassar.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, implementasi dan evaluasi (1st ed.).
- Hamidi, J. (2016). Jurnal Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Hukum*, 23(4).
- Hikmawati, F. (2018). Metodologi Penelitian (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Ilham, A. (2016). Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone. *Rakyatku.Com*.
<http://news.rakyatku.com/read/7610/2016/06/02/>
- Undang - Undang Dasar, (1945).
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, (1997).
- Undang - Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2003).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, (2009).
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, (2016).
- Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas (1st ed.).
- Langkai, J. E. (2020). Kebijakan Publik (1 (ed.)).
- Lesatri, E. P. (2017). Tesis Aksesibilitas Perpustakaan bagi Difabel berdasarkan Pada Standar IFLA Di UPT Balai Layanan Perpustakaan "Grahatama Pustaka." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mulyadi, D. (2018). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.
- Paikah, N. (2017). Implementasi Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di kabupaten Bone. 16(1).
- Sukinah. (2010). Jurnal Manajemen Strategik Implementasi Pendidikan Inklusi. Pendidikan Khusus, 7.
- Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik & Transaparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Aslinda, & Guntur, M. 2017. Perubahan Kebijakan Implementasi Pemanfaatan Ruang oleh Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar. 1,